

**DAMPAK PANDEMI COVID 19 TAHUN 2020 TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS LANTABUR
TEBUIRENG GRESIK**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

SKRIPSI

Oleh :

Hasbi Abdul Aziz

NIM : G94217163

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Hasbi Abdul Aziz, G94217163), menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah karya asli saya, benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atas nama saya, juga bukan hasil meniru atau menjiplak karya orang lain. Karya ini belum pernah diajukan ke Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau perguruan tinggi lainnya untuk memperoleh gelar.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali suatu teks yang dicantumkan secara jelas sebagai acuan dengan menyebutkan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya, dan apabila dikemudian hari terdapat kejanggalan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini, karena sanksi lainnya adalah konsisten dengan standar dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 13 September 2021

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10.000', and 'METERAN TEMPEL'. The signature is written in black ink over the stamp.

Hasbi Abdul Aziz

NIM : G94217163

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hasbi Abdul Aziz NIM G94217163 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 September 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Abdul Hakim', written over a horizontal line.

Dr. Abdul Hakim, M. EI

NIP : 1970008042005011003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hasbi Abdul Aziz NIM G94217163 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 30 September 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.
NIP : 197008042005011003

Penguji II,



Dr. Imronul Azizah, M.Ag.
NIP : 197308112005012003

Penguji III,



Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I.
NIP : 198106062009012008

Penguji IV,



Lusqita Romlausyah, S.A., M.A.
NIP : 199210262020122018

Surabaya, 18 Oktober 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasbi Abdul Aziz
NIM : G94217163
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : hasbiaziz99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Dampak Pandemi Covid 19 Tahun 2020 Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Lantabur

Tebuireng Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2021

Penulis

(Hasbi Abdul Aziz)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 adalah tahun yang cukup memprihatinkan bagi masyarakat di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID 19 yang memiliki dampak yang cukup buruk bagi segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi terutama perekonomian di Indonesia. Aspek ekonomi pun memiliki banyak sektor salah satunya adalah sektor perbankan. Perbankan sendiri memiliki tiga macam yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Dampak dari pandemi COVID 19 terhadap sektor perbankan yang paling sering ditemui adalah pembiayaan bermasalah. Hal ini sangat masuk akal karena selama pandemi COVID 19, pemerintah pusat maupun daerah menerapkan yang namanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengakibatkan banyak pekerja-pekerja terutama pekerja yang dari perusahaan swasta yang terkena PHK. Otomatis pendapatan mereka tidak ada dan bagi yang memiliki cicilan di lembaga keuangan bank akan mengalami pembiayaan bermasalah. Dilansir dari *Merdeka.com*, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mencatat selama pandemi COVID-19, 17,8% perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, 25,6% perusahaan merumahkan para pekerjanya, dan 10% perusahaan melakukan keduanya. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2020, sekitar 88% perusahaan di Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kerugian operasional. Data di atas bisa dijadikan salah satu sumber untuk membantu penelitian ini mengenai dampak dari pandemi COVID 19 terhadap perusahaan, yang mana dalam konteks penelitian ini adalah BPRS Lantabur Tebuireng Gresik.

Dari segi pendapatan dari sejumlah perbankan yang ada di Indonesia, dilansir dari CNBC Indonesia, OJK mencatat pada Juni 2020, pinjaman di sektor perbankan syariah meningkat sebesar Rp 67,39 triliun, meningkat secara year-on-year 0,59% (yoy) atau 1,83% (*year-to-date*) menjadi Rp 5,581,8 triliun. Didorong oleh pemerintah, OJK dan otoritas terkait lainnya, hal ini melanjutkan tren perbaikan selama empat bulan terakhir. Peningkatan

ini disebabkan oleh besarnya permintaan pembiayaan dari masyarakat seiring dengan peralihan profesi mereka yang awalnya adalah seorang pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausaha. Dari data di atas penulis bisa memiliki gambaran apakah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga mengalami peningkatan dalam hal pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi peningkatan angka pembiayaan tidak disertai dengan kemampuan membayar angsuran dari sebagian nasabah yang melakukan pembiayaan yang berdasarkan data sebagai berikut.

Dari OJK melalui CNN Indonesia, pihak OJK sendiri memprediksi bahwa rasio pembiayaan bermasalah atau biasa disebut (*Non Performing Financing /NPF*) perbankan syariah di Indonesia akan terus meningkat. Akibat pandemi, NPF yang sebelumnya sebesar 2,53 persen pada Desember tahun 2019 menjadi sebesar 3,06 persen pada Desember tahun 2020. Data di atas menjadi acuan OJK untuk memperkirakan bahwa pembiayaan bermasalah di sektor perbankan syariah akan terus meningkat dikarenakan laporan NPF tahun 2020 yang tak kunjung membaik.

Bersumber dari *kontan.co.id*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga dari sejumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia hingga September 2020, *Non Performing Financing* (NPF) gross sebesar 2,89%, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Desember 2019 yaitu 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada tahun 2019 yaitu 2,59% yang artinya peningkatan pembiayaan yang bermasalah di sejumlah perbankan menurut OJK meningkat selama pandemi dibandingkan tahun 2019 yang mana sebelum pandemi COVID 19.

Data lain juga menyebutkan yang bersumber dari *bisnis.com*, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalum mengklaim Rasio pembiayaan bermasalah bank perkreditan rakyat syariah terus meningkat sejak adanya pandemi atau mulai Bulan Maret 2020. Terakhir kali posisi rasio pembiayaan bermasalah pada Juli 2020 telah menyentuh level 8,34 persen. Sebelum pandemi, atau Maret 2020, *Net Performing Financing* (NPF) terhadap BPRS adalah 7,95%. Pada Januari dan

Februari 2020, pembiayaan yang bermasalah masing-masing adalah 7,26% dan 7,53%. Menurut dia, angka yang dikutip masih moderat karena didukung oleh program restrukturisasi pembiayaan, yang tanpa program tersebut jumlah pembiayaan yang bermasalah akan menjadi lebih meningkat. Dari data-data mengenai rasio NPF (*Non Performing Financing*) di atas sebagai acuan apakah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga mengalami peningkatan dalam hal rasio NPF (*Non Performing Financing*).

Berbicara mengenai pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah sendiri memiliki definisi yaitu suatu kondisi di mana penyimpangan dari persyaratan pinjaman yang disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman ketika membayar kembali pinjaman menimbulkan kecurigaan penundaan, perlunya tindakan hukum, atau kemungkinan kerugian. Dalam portofolio keuangan, pendanaan tidak aktif tetap menjadi bagian penting dari manajemen, karena faktor risiko dan kerugian atas risiko aset ini mempengaruhi kesehatan. (Rivai, 2008).

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain yaitu dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak peminjam sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah. Kemudian adanya unsur kemauan untuk membayar dan unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk mengangsur pembiayaan tidak ada. (Hariyani, 2010).

Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara antara lain yaitu *rescheduling* yang mana dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Kemudian

reconditioning yaitu dengan melakukan penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Dan dilanjut dengan *restructuring*, *restructuring* sendiri merupakan suatu bentuk upaya dengan mengkonversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bit tamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*. Dan yang terakhir adalah melelang barang jaminan, melelang barang jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad yang baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya (Djamil, 2012).

Kemudian mengerucut lagi dari dari perbankan ke Bank Pengkreditan Rakyat, karena penulis mengambil studi ekonomi syariah makan yang akan dibahas adalah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau biasa disingkat dengan BPRS. BPRS sendiri memiliki definisi yaitu bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS juga tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS hanya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011). Di BPRS sendiri terdapat beberapa layanan salah satunya adalah layanan pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha adalah Menjual barang dengan harga pokok/harga pokok ditambah dengan mark-up atau tingkat keuntungan yang telah disepakati. Dalam beberapa kitab fiqih, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang terpercaya, jual beli berbeda dengan jual beli *musawwamah* (*negosiasi*). *Murabahah* dilakukan oleh pembeli dan penjual berdasarkan harga barang, harga jual asli penjual diketahui pembeli, dan keuntungan penjual juga diketahui pembeli. *Musawwamah* adalah transaksi antara pembeli dan penjual. Harga pembeli tidak mempertimbangkan harga asli barang (Zulfiyanda, 2020).

Berbicara mengenai BPRS, penulis tertarik mengambil subjek penelitian

pendekatan penjaminan, karakter, kemampuan pembayaran kembali, studi kelayakan, dan pendekatan fungsi bank. Ditambah dengan penerapan prinsip analisa pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral*, dan kondisi perekonomian. Dan di BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen melakukan penekanan yang lebih masif pada tahun 2019 dikarenakan laporan NPF tahun 2018 tidak lebih baik dari tahun 2017. NPF tahun 2017 sebesar 1,15 % sedangkan tahun 2018 naik sebesar 1,24 %. Penelitian ini jika dikatikan dengan kondisi di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu dalam hal dampak yang ditimbulkan dari COVID 19 yang mengakibatkan pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik melakukan upaya penekanan dalam hal survei pembiayaan pada periode berikutnya.

Desi Handayani, 2020, Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh). Salah satu hasil penelitian ini menyebutkan bahwa BPRS Al-Makmur dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) berada dalam kondisi atau tingkat kesehatan yang kurang sehat pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2020. Untuk triwulan 1 2020 angka NPF sebesar 8,52 persen sedangkan untuk triwulan 2 tahun 2020 sebesar 8,66 persen. Hal tersebut dikarenakan situasi ekonomi yang memaksa para nasabah BPRS Al-Makmur untuk menunda melunasi angsuran mereka. Jika dikatikan dengan kondisi di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu kesamaan dalam hal angka NPF yang cenderung kurang sehat selama tahun 2020 yang disebabkan karena krisis global yang disebabkan pandemi COVID 19.

Taudlikhul Afkar, 2021, Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna' dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi COVID 19. Salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan rata-rata jumlah pembiayaan yang diberikan selama pandemi COVID 19, dengan demikian memberikan gambaran bahwa masyarakat di Indonesia masih memberikan sikap positif terhadap pemenuhan transaksi jual-beli. Kondisi seperti ini didukung oleh pernyataan yang menjelaskan bahwa *murabahah* masih mendominasi jenis pembiayaan syariah dibandingkan jenis pembiayaan syariah lainnya. Adanya kemampuan masyarakat di Indonesia untuk melakukan transaksi jual-beli, juga menunjukkan kepercayaan

masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang dilakukan bank syariah dengan adanya ukuran tingkat efisiensi dalam pembiayaan dengan adanya kemaslahatan melalui keadilan. Hal ini karena terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan *Islamic Social Finance* mampu meningkatkan pendapatan UMKM selama pandemi COVID 19 atau karena pembiayaan *murabahah* ini merupakan salah satu pembiayaan yang memberikan kepastian pendapatan dari selisih harga jual dengan harga beli sehingga menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait aset yang diperjualbelikan. Jadi inti dari salah satu hasil penelitian di atas adalah dua hal yang saling menguntungkan satu sama lain selama pandemi COVID 19 yaitu UMKM dan Bank Syariah yang memberikan pembiayaan *murabahah* yang menjadi alasan mengapa rata-rata pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19 justru meningkat. Keterkaitan dengan penelitian yang saya tulis adalah dua variabel yang sama yaitu pembiayaan *murabahah* dan pandemi COVID 19. Dan dari hasil penelitian di atas juga memiliki kesamaan dengan latar belakang penelitian yang saya tulis yaitu pernyataan yang menyebutkan bahwa selama pandemi COVID 19 terjadi peningkatan dalam hal pembiayaan pada sektor perbankan syariah.

Tri Sundari, 2021, Analisis Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi). Hasil dari penelitian ini yaitu Pada tahun 2018 pembiayaan bermasalah sebanyak 38 nasabah, di restrukturisasi sebanyak 12 nasabah. Pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah sebanyak 23 nasabah, di *restrukturisasi* sebanyak 9 nasabah dan pada tahun 2020 pembiayaan bermasalah sebanyak 52 nasabah, di *restrukturisasi* sebanyak 34 nasabah. Jadi tahun 2020 yang mana tahun terjadinya pandemi COVID 19 merupakan tahun terbanyak terjadinya pembiayaan bermasalah serta dilakukannya restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan *restrukturisasi* adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi berupa *rescheduling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman tanpa mengubah sisa kewajiban

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang dilengkapi data-data yang telah didapatkan oleh penulis dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara di Kantor BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Hasil penelitiannya adalah profil dari BPRS Lantabur Tebuireng Gresik kemudian dampak dari pandemi COVID 19 tahun 2020 terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dan yang terakhir yaitu langkah yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan *murabahah* yang disebabkan adanya pandemi COVID 19.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilengkapi data-data yang didapat oleh penulis dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara di Kantor BPRS Lantabur Tebuireng yang memunculkan sebuah analisis antara lain yaitu analisis mengenai dampak pandemi COVID 19 tahun 2020 terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yang menjelaskan bahwa faktor penyebab dari pembiayaan *murabahah* yang bermasalah adalah banyak nasabah yang mata pencahariannya terdampak pandemi COVID 19 yang menyebabkan berkurangnya penghasilan bahkan tidak ada penghasilan sama sekali kemudian tidak adanya sumber penghasilan lain selain dari profesinya. Dan yang terakhir yaitu analisis solusi yang ditawarkan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan masalah pada pembiayaan *murabahah* selama pandemi COVID 19 tahun 2020. Pada bagian ini, upaya yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik sudah sesuai dengan teori yang sudah ada dan penelitian terdahulu dalam hal urutan penanganan pembiayaan bermasalah kemudian bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan dan tidak ada penambahan atau pengurangan pada angsuran pokok, margin dan total kewajiban yang merupakan salah satu persyaratan dalam restrukturisasi pembiayaan.

Gambar 2.1 Alur *Murabahah* Berdasarkan Pesanan**e. Perhitungan Margin *Murabahah***

Keuntungan dari pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain (Aji, 2009) :

1. Jumlah pembiayaan
2. Lama pembiayaan
3. Sistem pengembalian. *murabahah* dengan cara mengangsur berbeda dengan *murabahah* yang dibayar tangguh.
4. Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut.

$$\text{Margin} = 2.5\% \times \text{Jumlah Pinjaman} \times \text{Jangka Waktu Pinjaman}$$

f. Penerapan dan Skema *Murabahah*

Pelaksanaan *murabahah* dalam perbankan syariah terutama didasarkan pada tiga hal penting, yaitu harga beli, biaya yang disepakati dan perjanjian biaya tambahan. Ciri-ciri kontrak pembiayaan *murabahah* sebagai berikut (Saeed, 2008) :

- a) Pembeli harus diberitahu tentang biaya yang relevan dan harga pokok barang sebagai persentase dari total harga dan biaya lainnya, serta batas margin.
- b) Barang dagangan yang dijual adalah barang dagangan atau barang dagangan yang dibayar dengan uang.
- c) Barang-barang dalam transaksi itu harus ada dan menjadi milik penjual, dan barang-barang itu harus diserahkan kepada pembeli.
- d) Keterlambatan pembayaran.

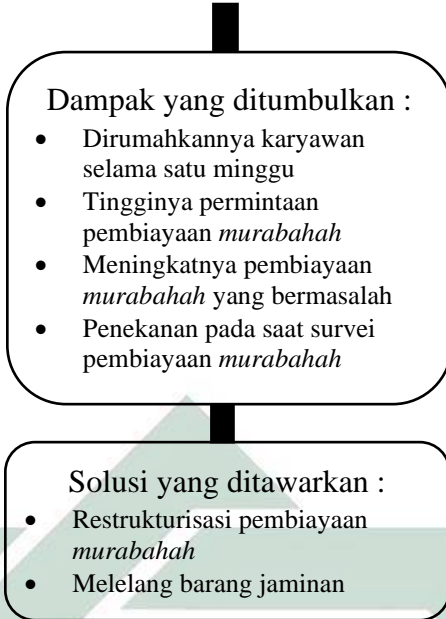
Skema akad *wakalah* dari pembiayaan *murabahah* ada pada gambar dibawah ini :

produktivitas (kinerja), yaitu kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Tentu saja dari sisi bank mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya cadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif), sedangkan dari sisi negara mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berkualitas kurang lancar, diragukan dan macet. (Djamil, 2012).

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam usaha itu sendiri dan faktor yang dominan adalah faktor manajemen. Kesulitan keuangan perusahaan karena faktor manajemen dapat dilihat dari beberapa faktor seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, pengendalian biaya yang lemah, kebijakan pembiayaan yang tidak memadai, aset tetap yang banyak dan modal yang tidak mencukupi. Faktor eksternal adalah yang berada di luar kendali manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perang, perubahan kondisi ekonomi dan bisnis, perubahan teknologi dan lain-lain.

Untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk menangani pembiayaan bermasalah, pertama-tama perlu untuk memeriksa penyebab pembiayaan bermasalah tersebut. Jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu menganalisis lebih lanjut. Yang dibutuhkan adalah bagaimana agar nasabah segera direimburse oleh perusahaan asuransi. Yang perlu dikaji adalah faktor internal, yaitu yang disebabkan oleh manajemen perusahaan. Jika bank melakukan pengawasan yang cermat setiap bulan, setiap tahun, maka masalah keuangan akan muncul, kurang lebih terkait dengan lemahnya pengawasan itu sendiri. Kecuali kegiatan pengawasan telah



Dampak yang ditimbulkan :

- Dirumahkannya karyawan selama satu minggu
- Tingginya permintaan pembiayaan *murabahah*
- Meningkatnya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah
- Penekanan pada saat survei pembiayaan *murabahah*

Solusi yang ditawarkan :

- Restrukturisasi pembiayaan *murabahah*
- Melelang barang jaminan

Penjelasan dari bagan kerangka konseptual di atas adalah salah satu produk pembiayaan dari BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu produk pembiayaan murabahah sedang terdampak pandemi COVID 19. Dampak yang ditimbulkan antara lain yaitu tingginya permintaan pembiayaan murabahah di saat yang bersamaan juga terjadi peningkatan pembiayaan murabahah yang bermasalah dan yang terakhir menyebabkan BPRS Lantabur Tebuireng Gresik melakukan penekanan pada saat survei pembiayaan *murabahah*. Dengan munculnya permasalahan pada produk pembiayaan *murabahah*, BPRS Lantabur Tebuireng Gresik memberikan tawaran kepada nasabah dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan *murabahah*. Ada dua tawaran yang diberikan yaitu restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dan melelang barang jaminan.

Data Sekunder pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan profil lembaga, kebijakan lembaga, laporan keuangan yang secara khusus mengenai produk pembiayaan *murabahah* dari lembaga yang bersangkutan, dan data-data nasabah yang memiliki pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang dilakukan penulis untuk penelitian ini adalah mengambil data-data yaitu profil kelembagaan dan laporan keuangan yang secara spesifik mengenai produk pembiayaan *murabahah*.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis datang langsung ke lapangan yaitu kantor BPRS Lantabur Tebuireng Gresik untuk mengamati bagaimana BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam menyelesaikan permasalahan dalam produk pembiayaan *murabahah*.

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang dijadikan sebagai responden. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang di berikan tidak mutlak pada pedoman wawancara dan bisa disesuaikan situasi dan

(OJK), artikel berita dan dokumentasi di BPRS. Untuk triangulasi teknik, penulis ingin menggalai informasi tentang metode restrukturisasi pembiayaan, penulis menggali informasi tersebut dengan wawancara kepada pihak yang berkompeten yaitu marketing *lending* BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, kemudian observasi langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik, dan dokumentasi berupa tabel angsuran yang telah melakukan proses restrukturisasi pembiayaan. Dan untuk triangulasi waktu, penulis ingin memperoleh informasi dari beberapa nasabah mengenai faktor penyebab nasabah tidak mampu mengangsur pembiayaan murabahah selama pandemi COVID 19 dari segi mata pencahariannya. Untuk memperoleh informasi tersebut penulis harus melakukan wawancara kepada nasabah yang bersangkutan tidak bisa dilakukan di waktu yang sama harus dengan waktu yang berbeda.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Mengedit Data (*Editing*)

Adalah memeriksa data yang diterima, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, keberlakuan, dan relevansi dengan data lain (Narkubo, 2005). Dalam penelitian ini penulis mengedit hasil wawancara dengan narasumber BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yang terlibat dalam proses pembiayaan *murabahah*.

2. Mengelompokkan Data (*Organizing*)

Adalah Proses pengelompokan semua data dari objek penelitian, pengamatan dan interpretasi, atau pengamatan langsung di lokasi. Membaca setiap data yang diperoleh, kemudian melakukan analisis dan klasifikasi yang mendalam sesuai kebutuhan (Moleong, 2003). Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif bagi peneliti.

3. Menyimpulkan Data (*Conclusion*)

Adalah menganalisis data setelah proses organisasi, penggunaan teori, argumen, dan aturan yang tepat untuk analisis data, sehingga

4) Legal Administrasi

- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan yang disetujui.
- Menyimpan dokumen kontrak dan jaminan yang mengikat untuk realisasi pembiayaan.
- Menetapkan jadwal untuk kontrak yang akan ditandatangani dan dana yang akan dibayarkan. Menerapkan prosedur notaris atau pembiayaan rahasia.
- Menyerahkan dokumen pembiayaan kepada manajer pemasaran untuk ditinjau dan disetujui.

5) Operasional

- Mengurus kuitansi transaksi dari kasir.
- Memeriksa kelengkapan catatan akuntansi dan kebenaran setiap bagian dari catatan transaksi atau tagihan.
- Membuat ringkasan harian dari setiap operasi.
- mencatat semua proses kerja yang terjadi pada hari itu.

6) *Teller*

- Menyediakan layanan penarikan tunai atau setoran. Cek/Bilyetgiro dari nasabah ke bank.
- Membuka pintu khasanah dengan manajer operasi.
- Meminta cash teller kepada manajer operasi setiap hari.
- Melakukan pemeriksaan apakah slip pembayaran yang diberikan oleh pelanggan sudah lengkap.

7) Gadai Emas (*Rahn*)

- Melayani nasabah yang akan menggadaikan emas untuk ditukarkan dengan uang baik tunai maupun non tunai.
- Melakukan penaksiran pada emas supaya mendapatkan nilai harga dari emas yang akan dipinjamkan kepada nasabah.
- Mengkonversikan dari yang berupa emas batangan ke nilai mata uang yang akan dipinjamkan kepada nasabah.

8) *Customer Service*

- Melayani setiap tamu yang akan menemui pegawai-pegawai

pendapatan mereka selalu naik setiap tahunnya. Dan realitanya hal tersebut sulit untuk direalisasikan karena kondisi ekonomi makro selalu bergerak dinamis. Salah satu penyebab yang bisa menyebabkan kondisi ekonomi makro di suatu negara mengalami perubahan yang signifikan krisis ekonomi global dan adanya pandemi. Dan pandemi COVID 19 yang terjadi sekarang adalah salah satu contoh penyebab suatu perusahaan kesulitan untuk meningkatkan pendapatan.

Hal tersebut akan berbeda jika membahas pada sektor perbankan. Justru selama pandemi COVID 19, sektor perbankan mengalami kenaikan dalam hal pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan. Data menyebutkan bersumber dari CNBC Indonesia, OJK mencatat pada Juni 2020, pinjaman di sektor perbankan syariah meningkat sebesar Rp 67,39 triliun, meningkat secara year-on-year 0,59% (yoy) atau 1,83% (*year-to-date*) menjadi Rp 5,581,8 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh besarnya permintaan pembiayaan dari masyarakat seiring dengan peralihan profesi mereka yang asalnya adalah seorang pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausaha.

Sebagian orang akan mempertanyakan mengapa justru di saat pandemi COVID 19 yang mana banyak mata pencaharian yang terdampak justru terjadi peningkatan piutang pendapatan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mustain selaku *marketing lending*, hal tersebut dikarenakan dari kejadian banyaknya mata pencaharian yang terdampak selama pandemi yang menimbulkan tingginya permintaan pada pembiayaan *murabahah*, pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik tidak serta merta meloloskan untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*. BPRS Lantabur Tebuireng Gresik tetap melakukan verifikasi yang sesuai SOP dan dari semua nasabah yang lolos, mereka memiliki alternatif penghasilan meskipun tidak sebesar sebelum terjadinya pandemi. Akhirnya pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik hanya memberikan pinjaman yang sesuai dengan penghasilan nasabah. Jadi kesimpulannya adalah secara kuantitas jumlah nasabah cukup besar dan kuantitas dari

signifikan dibandingkan dengan bulan Desember 2019 yaitu 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada tahun 2019 yaitu 2,59% yang artinya peningkatan pembiayaan yang bermasalah di sejumlah perbankan menurut OJK meningkat selama pandemi dibandingkan tahun 2019 yang mana sebelum pandemi COVID 19. Data lain juga menyebutkan yang bersumber dari *bisnis.com*, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam mengklaim Rasio pembiayaan bermasalah bank perkreditan rakyat syariah terus meningkat sejak adanya pandemi atau mulai Bulan Maret 2020. Terakhir kali posisi rasio pembiayaan bermasalah pada Juli 2020 telah menyentuh level 8,34 persen. Sebelum pandemi, atau Maret 2020, *Net Performing Financing* (NPF) terhadap BPRS adalah 7,95%. Pada Januari dan Februari 2020, pembiayaan yang bermasalah masing-masing adalah 7,26% dan 7,53%. Menurut dia, angka yang dikutip masih moderat karena didukung oleh program restrukturisasi pembiayaan, yang tanpa program tersebut jumlah pembiayaan yang bermasalah akan menjadi lebih meningkat.

Kemudian hasil penelitian dari Desi Handayani pada tahun 2020 yang berjudul “*Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh)*” menyebutkan bahwa BPRS Al-Makmur dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) berada dalam kondisi atau tingkat kesehatan yang kurang sehat pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2020. Untuk triwulan 1 2020 angka NPF sebesar 8,52 persen sedangkan untuk triwulan 2 tahun 2020 sebesar 8,66 persen. Hal tersebut dikarenakan situasi ekonomi yang memaksa para nasabah BPRS Al-Makmur untuk menunda melunasi angsuran mereka. Berdasarkan data dari berita dan penelitian terdahulu di atas, dapat memperkuat bahwa di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik juga mengalami hal yang sama dalam hal tingkat NPF yang cenderung kurang sehat pada tahun 2020 yang disebabkan krisis global yaitu pandemi COVID 19 dan memberikan bukti bahwa pembiayaan

restrukturisasi . Sebelum restrukturisasi pembiayaan, jangka waktu tagihan Hamba Allah adalah 12 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp. 972.222,00 serta 972.230 di akhri bulan dan margin sebesar Rp.490.000,00 total angsuran sebesar Rp 1.462.222,00 dan 1.462.230 di akhir bulan. Dan setelah pihak BPRS Lantabur Tebuireng melakukan restrukturisasi pembiayaan, angsuran Hamba Allah menjadi 15 bulan dengan angsuran pokok Rp. 512.311,00 dengan margin Rp. 392.000,00 total angsuran sebesar Rp. 904.311,00 untuk 6 bulan pertama. Kemudian untuk 6 bulan berikutnya angsuran pokok sebesar Rp. 812.311,00 dengan margin yang sama dengan 6 bulan sebelumnya total angsuran sebesar Rp.1.204.311,00. Kemudian untuk sisa 3 bulan terakhir, 2 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp. 1.112.311,00 dan margin yang sama 12 bulan sebelumnya total angsuran sebesar Rp.1.504.311,00 dan 1 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp. 1.494.318,00 dan margin yang sama 14 bulan sebelumnya total angsuran sebesar Rp.1.886.318,00. Jadi restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan mengubah jangka waktu sisa angsuran yang mengharuskan mengubah angsuran pokok dan jumlah margin supaya sama dengan total angsuran tanpa harus mengurangnya.

Proses restrukturisasi di atas sudah sesuai dengan teori yang membahas tentang bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut (Djamil, 2012) :

- a) Mengubah imbalan atau bagi hasil;
- b) Mengubah tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- c) Mengubah tunggakan pokok pembiayaan;
- d) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan;
- e) Menambah fasilitas pembiayaan;
- f) Mengambil alih aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Beberapa poin di atas yang sudah dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan

yang secara otomatis juga mengubah tunggakan pokok pembiayaan, tunggakan imbalan atau bagi hasil, dan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan penelitian yang telah ditulis oleh Tri Sundari pada tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)*”. Disitu dijelaskan bahwa salah satu metode restrukturisasi yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi adalah *rescheduling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah. Hal tersebut juga dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik seperti yang sudah dijelaskan pada bagan 3.1. Jadi berdasarkan teori dan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, BPRS Lantabur Tebuireng Gresik telah melakukan beberapa metode-metode restrukturisasi yang sesuai dengan teori yang sudah ada dan penelitian terdahulu.

2. Melelang Barang Jaminan

Upaya melelang barang jaminan yang secara teori sudah dibahas oleh Djamil Faturrahman dalam bukunya yang berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*” juga dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik. Melelang barang jaminan merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik ketika nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah kemudian pihak nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi angsuran *murabahah* dan mereka tidak memiliki ikhtiar untuk mencari alternatif penghasilan setelah kehilangan penghasilan utama akibat dari pandemi COVID 19. Sebagai solusi untuk melunasi sisa angsuran mereka, menurut Pak Mustain selaku divisi *marketing lending*, hal ini dilakukan sebagai jalan terakhir dikarenakan melelang barang jaminan selama pandemi COVID 19 cukup sulit. Apalagi jangkauan BPRS untuk menarik peminat supaya membeli barang lelang tidak sebesar Bank Umum Syariah lainnya yang skalanya lebih besar baik itu swasta maupun BUMN. Oleh karena itu sebisa mungkin diupayakan untuk mediasi ke nasabah supaya melunasi sisa angsuran dengan nasabah

dengan diberikan keringanan sisa angsuran melalui restrukturisasi pembiayaan dari nasabah yang bersangkutan dan apabila nasabah tidak ada itikad baik dalam mediasi tersebut maka pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik terpaksa harus melelang barang jaminan dari nasabah tersebut.

Setiap upaya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu pasti ada hambatan yang harus dilalui. Begitupun juga di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik ini, dalam upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga memiliki hambatan. Bapak Mustain mengatakan bahwa hambatan tersebut muncul ketika langkah restrukturisasi yang ditawarkan kepada nasabah tidak berjalan semestinya. Hal ini pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik terpaksa mengharuskan untuk melelang jaminan mereka yaitu nasabah yang bermasalah ketika ditawarkan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Yang sudah dijelaskan oleh Bapak Mustain bahwa melelang barang jaminan pada saat pandemi adalah suatu hal yang sulit dan bisa jadi merugikan dikarenakan kebanyakan orang sedang mengalami kesusahan sehingga tidak sempat bagi mereka untuk membelinya lalu jangkauan BPRS untuk menarik peminat supaya membeli barang lelang tidak sebesar Bank Besar baik swasta maupun BUMN yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa faktor mengapa nasabah tidak mengambil langkah restrukturisasi angsuran yang akhirnya mengharuskan pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik melelang barang jaminan nasabah berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mustain selaku divisi *marketing lending* antara lain :

1. *Kehilangan kontak dengan nasabah yang bersangkutan*

Ketika pihak BPRS Lantabur Tebuireng Gresik menghubungi nasabah yang memiliki angsuran yang nunggak, nasabah tersebut tidak dapat dihubungi dari baik melalui telepon maupun rumah yang didatangi orang tersebut tidak ada. Oleh karena itu mau tidak mau pihak BPRS harus melelang barang jaminan yang bersangkutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dampak yang terjadi pada produk pembiayaan murabahah selama pandemi COVID 19 tahun 2020 di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik antara lain :
 - a) Dirumahnya karyawan selama satu minggu yang berakibat aliran kas pada pembiayaan murabahah terhenti selama satu minggu.
 - b) Terjadi peningkatan pembiayaan *murabahah* yang disebabkan tingginya permintaan calon nasabah yang disebabkan banyaknya calon nasabah mata pencahariannya terdampak pandemi COVID 19.
 - c) Terjadi peningkatan pada pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan indikasi bahwa nilai rasio NPF (*Non Performing Financing*) semakin tinggi selama pandemi COVID 19 yaitu tahun 2020 dibandingkan sebelum pandemi COVID 19 yaitu tahun 2019.
 - d) Diberlakukan kebijakan berupa penekanan pada saat survei pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah setelah dilakukannya rapat akhir tahun yang menunjukkan laporan negatif selama tahun 2020 yaitu tahun terjadinya pandemi COVID 19.
2. Solusi yang diambil oleh BPRS Lantabur Tebuireng Gresik dalam upaya menyelesaikan masalah pada pembiayaan murabahah antara lain yaitu restrukturisasi pada pembiayaan yang bermasalah kemudian langkah terakhir jika restrukturisasi tidak bisa dilakukan yaitu dengan meleang barang jaminan yang dimiliki nasabah.
3. Dan yang terakhir yaitu kontribusi yang diberikan dari penelitian ini adalah sebuah referensi apabila ada yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dan bisa juga dijadikan sebagai rujukan bagi lembaga keuangan bank syariah lain khususnya BPRS apabila mengalami permasalahan yang sama pada penelitian ini terutama terkait dengan produk pembiayaan *murabahah*.

